

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adji, & Indriyanto Seno. (2015). *Korupsi Dan Penegakan Hukum*. Diadit Media.

Andriani, R. (2024). Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Dalam Pencegahan Korupsi BUMN. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 15(2), 113–128.

Arief, & Barda Nawawi. (2012). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

Chazawi, & Adami. (2016). *Hukum Pidana Korporasi*. Rajagrafindo Persada.

Effendy, & Marwan. (2013). *Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Sinar Grafika.

Hamzah, & Andi. (2014). *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Rajawali Pers.

Hamzah, & Andi. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Harahap, A. (2023). *Reformasi Pengelolaan BUMN Dan Risiko Korupsi*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.

Harahap, & Yahya. (2018). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.

Leden Manurung, S. H. (1991). *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum ( Delik )*. Sinar Grafika

Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media.

- Philipus M, & Hadjon. (2017). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo, & Satjipto. (2009). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press.
- Rahmawati, D., & Nugraha, Y. (2022). Harmonisasi Hukum Pidana Korporasi Dalam Pengaturan BUMN. *Rechtsvinding*, 11(3).
- Romli Atmasasmita, S. H. , Ll. M. (2004). *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*. Bayu Media Publishing.
- Romli Atmasasmita, S. H. , Ll. M. (2010). *Globalisasi Kejahatan Bisnis* . Prenada Media.
- Romli Atmasasmita, S. H. , Ll. M. (2013). *Buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukm Pidana*. Pt. Fikahati Aneska.
- Siregar, R. A., & Lubis, M. H. (2023). *Globalization And Corporate Crime: Challenges In State-Owned Enterprises. . Ilmu Hukum Korporasi*, 10(2).
- Soejono Soekanto, & Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

761\

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/Pmk.02/2022 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kekayaan Negara Dipisahkan Oleh Bendahara Umum Negara

### C. Publikasi Ilmiah

- Agung Satriadi Putra, & Diah Ratna Sari Haryanto. (2024). PERSPEKTIFKEPASTIAN HUKUM DEMI KEADILANDALAM KEWENANGAN KEJAKSAAN MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(6), 1329–1350.
- Agustinus Nugroho Jati, Gunawan Widjaja, & Dyah Ersita Yustanti. (2025). PRINSIP TATA KELOLA DAN PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN BUMN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2025. *NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS*, 1(9), 423–432.
- AHMAD. (2022). PENGGUNAAN SISTEM SANKSI PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORPORASI. *Ensiklopedia*, 4(1), 2–7.
- Alimudin, G. C. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Direksi dan Komisaris BUMN Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4822–4833. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4446>
- Amaliah, A., Marinda Machdar, N., & Pangaribuan, D. (2025). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Proporsi Direksi dan Komisaris Perempuan Terhadap Profitabilitas Bumn dengan Target Dividen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 3(1), 16–21. <https://doi.org/10.38035/jgia.v3i1.155>
- Anam, M. C. (2021). Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris dalam Kepailitan berdasarkan Prinsip Pierching The Corporate Veil. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 52–58. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i1.64>
- Anas Maulana, Rizka Sepriyanti, & Asep Guntur. (2025). Tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 444–452.
- Anwar, A., & Rauzi, F. (2023). ACCELERATION OF THE ROLE OF THE KPK IN PREVENTION AND ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS POST AMENDMENT TO LAW NUMBER 19 OF 2019. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i3.8346>
- Asmui. (2023). PENJATUHAN SANKSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 14(1), 137. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.16237>
- Batubara, G. T. (2013). PERAN ILMU KE-TUHANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *LAW REFORM*, 9(1), 53. <https://doi.org/10.14710/lr.v9i1.12434>
- Batubara, G. T., Yustia, R. D. A., & Ludiana, T. (2023). Restorative Treatment Against Corruption Inmates. In *Proceedings of the 3rd International*

*Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)* (pp. 752–757). Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-93-0\\_87](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-93-0_87)

- Budi Harianto. (2025a). Kerugian Negara Diakibatkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3899–3905. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1184>
- Budi Harianto. (2025b). Kerugian Negara Diakibatkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3899–3905. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1184>
- Budiman, M. (2023). PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) Undang-Undang NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PENCUCIAN UANG. *LITIGASI*, 24(2), 299–321. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.9966>
- Cahyani, E. D., Noerwianto, F., & Pangestu, D. A. (2025). Tantangan dan Strategi Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 7(1), 38–52. <https://doi.org/10.20884/1.sr.2025.7.1.16093>
- Christ Peter Masiliba, Adi Tirto Koesoemo, & Daniel Franzel Aling. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NOMOR 110 K/PID.SUS/2024) 1. *Lex Privatum*, 15(2), 2–9c.
- Christyanti, B. L. (2025). Tantangan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi dalam Implementasi Perubahan Ketiga UU BUMN. *Jurnal Inspektorat*, 1(1), 57–71. <https://doi.org/10.64527/inspektorat.v1i1.17>
- Daro, N. M., & Harris, F. (2025). Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Jika Terjadi Kerugian dalam Pengelolaan Investasi Danantara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1669–1676. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1473>
- Dewi Andika Permatasari, & Mardian Putra Frans. (2025). Kerugian Negara dan Pertanggungjawaban Pidana Kerugian BUMN: Analisis Pasal 3Y UU BUMN. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 129–136. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8525>
- Dony Endrassanto. (2021). STUDI ANALISIS HUKUM KEWENANGAN DAN TUGAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(10), 1769–1786.

- Dr. Gunawan Nachrawi, S. H. , M. H. (2021). *REINVENTING BUMN: Pengelolaan BUMN dalam Perspektif Pasal 33 UUD NRI 1945* (Arif Awangga, Ed.). Cendikia.
- Febriyanto, F. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS KERUGIAN KEUANGAN NEGERA YANG TELAH DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN). *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 8(2), 368. [https://doi.org/10.36841/cermin\\_unars.v8i2.5461](https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i2.5461)
- Firwanda Sandi Pradipta, & Ermania Widjajanti. (2025a). Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 80–90.
- Firwanda Sandi Pradipta, & Ermania Widjajanti. (2025b). Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 80–90.
- Habeahan, G. V., & July Esther. (2024). Analisis Pengajuan Rencana Tuntutan Oleh Oditur Militer Terhadap Perkara Pidana Prajurit TNI. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(02), 127–139. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i02.24375>
- Hamidah Abdurrachman. (2025a). Aspek Hukum Pidana dalam UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN: Korupsi, Pertanggungjawaban Korporasi, dan Status Pejabat serta Kekayaan BUMN. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 2–9.
- Hamidah Abdurrachman. (2025b). Aspek Hukum Pidana dalam UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN: Korupsi, Pertanggungjawaban Korporasi, dan Status Pejabat serta Kekayaan BUMN. *Berdikari*, 8(2), 1–12.
- Hanifah, F. N. (2024). Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Untuk Subjek Hukum Korporasi di Belanda dan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(6), 2300–2308. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i6.1236>
- Haryadi, I. (2024). Peran Yurisprudensi dalam Pengembangan Hukum Pidana di Era Digital. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 42–49. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1668>
- Hasbullah, G. (2023a). PENJATUHAN SANKSI KORUPSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah*, 1(02), 132–136. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.114>
- Hasbullah, G. (2023b). PENJATUHAN SANKSI KORUPSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah*, 1(02), 132–136. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.114>
- I Gede Sukarmo, & Khairul Aswadi. (2025). Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025. *Commerce Law*, 5(1), 126–136. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v5i1.7423>

- Indraswara, D., Masyhar Mursyid, A., & Wulandari, C. (2024a). Corporate Criminal Liability of Corruption Criminal Actions PT. Sinarmas Asset Management. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 5(2), 137–184. <https://doi.org/10.15294/digest.v5i2.3984>
- Indraswara, D., Masyhar Mursyid, A., & Wulandari, C. (2024b). Corporate Criminal Liability of Corruption Criminal Actions PT. Sinarmas Asset Management. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 5(2), 137–184. <https://doi.org/10.15294/digest.v5i2.3984>
- Ismaidar Ismaidar, & Muhamad Ilham. (2025). Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis Efektivitas Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(3), 153–160. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.275>
- Ismantara, S., Puspa Sari, R. A. D., Elvira, C., & Rahaditya, R. (2021). CARUT MARUT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI. *Prosiding SENAPENMAS*, 1179. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15154>
- Junior B. Gregorius. (2025). Klarifikasi Hukum Pidana Terkait Isu-Isu Tindak Pidana Korupsi Pasca UU BumN Nomor 1 Tahun 2025. *Berdikari*, 8(2), 37–51.
- KURNIAWAN, Y. M. (2019). *Administrasi Keuangan Pengertian Dan Ruang Lingkup Keuangan Negara*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/qtvws>
- Lidya Agustin, Sahuri Lasmadi, & Yulia Monita. (2024). Penyelesaian Secara Restoratif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *Journal Of CriminalLaw*, 5(3), 364–375.
- MedinaLoren, & HandoyoPrasetyo. (2025). CriminalLawEnforcementCorruptionAgainstState-OwnedEnterprises After The Enactment of The SOE Law In 2025. *Recthsidee*, 13(2), 1–12.
- M.Marwan, & Jimmy P. (2009). *Kamus Hukum*. Reality Publisher.
- Mukhammad Hykhal Shokat Ali. (2025a). Status Keuangan BUMN Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025: Reorientasi Hubungan Keuangan Negara–Korporasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 95–106. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1797>
- Mukhammad Hykhal Shokat Ali. (2025b). Status Keuangan BUMN Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025: Reorientasi Hubungan Keuangan Negara–Korporasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 95–106. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1797>
- Najmuddin, M. N., & Romlan, R. (2024). TINJAUAN YURIDIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI. *Justicia Journal*, 13(1), 52–61. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13106>
- Nanda Melani, & Shenti Agustini. (2021). KEJAHATAN KORPORASI: PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA. *Hukum*, 4(2), 4–12.

- Noor, A. (2025). Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Korupsi Pengadaan di Perusahaan BUMN dibidang Kontruksi. *Bulletin of Law Research*, 7–12. <https://doi.org/10.65344/bleach.v2i2.133>
- Nurjannah Tuanaya1, Faisal Malik, & Amriyanto. (2024). ImplementationofTheProsecutor’sIntelligenceAuthorityinInvestigationsofCorruptionCrimes. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 8(2), 165–170.
- Nurlaela Arifin, I. (2024). Peran Yurisprudensi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia: Kajian atas Putusan Mahkamah Agung. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 68–75. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1674>
- Oktan, F., Febriansyah, A., & Saputera, I. (2023). Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi. *Simbur Cahaya*, 81–104. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1961>
- Padil. (2016). KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Hukum Dan Tanggung Jawab*, 4(1), 45–55.
- Prakasa, R. S., Salsabila, N., Viona, W. O., Sherin, S., Rober, K., & Putera, A. A. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(2), 1053–1059. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i2.830>
- Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020a). Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 240. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>
- Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020b). Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 240. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>
- Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020c). Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 240. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>
- Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020d). Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 240. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>
- R, M., & Sipatuhar, C. M. R. (2024a). EKSISTENSI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU. *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 10(1), 133–141. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i1.3325>

- R, M., & Sipatuhar, C. M. R. (2024b). EKSISTENSI KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU. *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 10(1), 133–141. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i1.3325>
- Rahadiyan, I. (2014). KEDUDUKAN BUMN PERSERO SEBAGAI SEPARATE LEGAL ENTITY DALAM KAITANNYA DENGAN PEMISAHAN KEUANGAN NEGARA PADA PERMODALAN BUMN. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 20(4), 624–640. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art7>
- Rante Ubleeuw, A. G. (2022). KOMPARASI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 291. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64717>
- Rasji, Yuniati, & Zayyan Syafiqah Aggistri. (2024). PERUBAHAN REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN BUMN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA: TINJAUAN FILOSOFIS HUKUM. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 3–10.
- Rudi Hartono. (2021). Konsep Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum dan Akuntansi Publik. *Journal Neraca*, 5(2), 78.
- Sagita, A. (2018). PEMBAHARUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 309–330. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.2095>
- Sandi, M. Y., Hadin Muhjad, M., & Syaufi, A. (2023). Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero. *Notary Law Journal*, 2(3), 181–202. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.45>
- Sofiatul Istiqomah, Abdul Rokhim, & Diyan Isnaeni. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 278–297. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.43642>
- Stanley Muljadi Art, & Gunardi Lie. (2025). The Legal Liability of Directors in State-Owned Enterprises: An Analysis of Judicial Inconsistencies in the Application of the Business Judgment Rule Doctrine. *Corporate Law*, 20(4), 11–22.
- Syafana Hanifah de Vries, & Ratih Damayanti. (2025). IMPLIKASI DUALITAS KEDUDUKAN BUMN TERHADAP KEMANDIRIAN KORPORASI DAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 13(10), 2226–2240. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p05>

- Syaifudin, M. A., & Rusmana, D. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Perubahan Iklim: Tanggung Jawab Negara dan Korporasi. *Journal of Mandalika Social Science*, 2(2), 172–184. <https://doi.org/10.59613/jomss.v2i1.148>
- Trihatmoko, R. A. (2019). STATE-OWNED ENTERPRISES AND ECONOMIC CONSTITUTIONS: A CASE STUDY OF JUDICIAL REVIEW OF LAW NO.19 OF 2003. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(1), 149–155. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.149-165>
- Ulil Amri, I Kadek Sudiarsana, Kalen Sanata, & Reza Pramasta Gegana. (2025). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN Dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang BUMN. *Jurnal Hukum*, 6(4), 930–947.
- Victor K Pesik. (2014). KEWENANGAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Lex et Societatis*, 2(6), 104–112.
- Wibowo, A. (2020). Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 120. <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1025>
- Yusuf, I. R., Yudhana, A. F. W., Dawami, F., & Masruhin, N. Q. (2026). Tinjauan Yuridis Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara. *Perspektif*, 31(1), 22–34. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v31i1.976>
- Yusuf Randi. (2025). DARI NEGARA KE KORPORASI: TRANSFORMASI KEDUDUKAN KEKAYAAN BUMN DAN PENGUATAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE. In *Hukum Bisnis*.
- Zainul Arifin, Ismi Lailatul Maulida, & Rahayu Sri Utami. (2026). Kejahatan Korporasi pada BUMN dan Implikasi Pertanggungjawaban Direksi: Analisis Kasus Pengadaan LNG Pertamina. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 111–121. <https://doi.org/10.62383/humif.v3i1.2820>
- Zanuardani Al-Farizy. (2024). Reformasi Hukum Terhadap Pidana Ekonomi Indonesia. *Jurnal Bevinding*, 2(3), 39–50.
- Zhadira, G. R., Sendrawan, T., & Anindita, S. (2024). KEDUDUKAN KUASA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAMMENGHADIRI RUPS LUAR BIASA DENGAN AGENDAPEMBERHENTIAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS. *Indonesian Notary*, 5(4). <https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no4.57>